

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Bahasan yang telah penulis uraikan mengenai bagaimana munculnya perlawanan dalam pembangunan geothermal, bentuk perlawanan masyarakat terhadap pembangunan geothermal, dampak perlawanan masyarakat terhadap kebijakan dan proses pembangunan geothermal. Adapun simpulan yang dapat penulis uraikan bahwa perlawanan masyarakat terhadap pembangunan geothermal memberikan dampak yang bervariasi, termasuk perubahan rencana pembangunan, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, serta interaksi yang lebih terbuka antara perusahaan dan masyarakat. Penulis menjelaskan rincian poin di atas sebagai berikut:

Pertama, munculnya perlawanan dalam pembangunan geothermal diantaranya adalah: (1) Geothermal berdampak pada permasalahan lingkungan seperti air keruh, sumber mata air Senthulu nyaris dibangun geothermal, uap penyebab percepatan karat, dan alasan kebisingan akibat bunyi mesin. (2) Permasalahan teknis operasional seperti kebocoran gas yang menyebabkan pekerja dan masyarakat terkena dampak kecelakaan kerja maupun keracunan gas yang seharusnya tidak dihirup warga. (3) Akomodasi kehendak rakyat seperti permintaan ganti rugi lahan yang dipakai masyarakat untuk kebutuhan pertanian dan dialihkan ke PT Geodipa.

Kedua, bentuk perlawanan masyarakat terhadap pembangunan geothermal diantaranya adalah terdapat perlawanan secara konvensional dan media sosial. Perlawanan masyarakat secara konvensional terfokus kepada gerakan sosial yang

dipimpin oleh Walhi Jawa Tengah. Perlawanan melalui media sosial dilakukan pada platform Instagram yaitu oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang, @diengundercover, @jatamnas atau Jaringan Advokasi Tambang, @koalisirakyatuntukhakatasair, @walhijateng atau Walhi Jawa Tengah, @aksikamisansemarang, dan oleh aktivis lokal dari PerpustakaanRakjat.

Ketiga, dampak perlawanan masyarakat terhadap kebijakan dan proses pembangunan geothermal adalah: (1) Berpindahnya rencana pembangunan *power plant* baru yang semula di Desa Karangtengah ke Desa Sitrus, (2) Bertambahnya kesempatan kerja masyarakat Dusun Karangtengah menjadi pegawai PT Geodipa, (3) Terbatasnya pendapatan UMKM masyarakat Desa Karangtengah. (4) Ruang hidup di Dusun Karangtengah terhindar dari dampak negatif geothermal. (5) Keterbukaan pihak PT Geodipa dalam audiensi pelibatan masyarakat terhadap rencana kegiatan pengembangan geothermal.

Meskipun terdapat perlawanan dari masyarakat terhadap pembangunan geothermal, yang meliputi dampak lingkungan, permintaan ganti rugi lahan, serta perlawanan konvensional dan melalui media sosial, namun kebijakan dan proses pembangunan geothermal masih tetap berlanjut. Meskipun demikian, pemerintah telah berhasil mengatasi beberapa dampak perlawanan tersebut, seperti perpindahan lokasi pembangunan *power plant*, peningkatan kesempatan kerja, serta upaya terbatas dalam mendukung pendapatan UMKM. Meskipun demikian, peminjaman dana dari *World Bank* pada tahun 2019 sebesar \$35 miliar untuk memaksimalkan pengembangan geothermal di Indonesia, tetap dilaksanakan tanpa intervensi dari pihak World Bank, dan penanganan

permasalahan perlawanan tersebut dilakukan oleh pihak regional yaitu atas campur tangan pemerintah Desa Karangtengah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait perlawanan pembangunan geothermal di kawasan Dieng, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah mengadakan dialog terbuka dan transparan antara PT Geodipa Energi, masyarakat lokal, dan aktivis. Dialog ini sebaiknya bersifat transparan, memberikan ruang bagi pertanyaan, klarifikasi, dan diskusi untuk menghindari munculnya miskomunikasi dan ketegangan. Selain itu, diperlukan kampanye pendidikan dan peningkatan literasi masyarakat terkait sejarah perusahaan, regulasi pembangunan, dan dampak geothermal. Informasi yang jelas dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih terinformasi.

Selanjutnya, kajian dampak lingkungan yang lebih mendalam harus dilakukan oleh Pihak PT Geodipa sebagai dasar keputusan untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat juga perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan melalui pembentukan forum partisipatif. Pengawasan dan penegakan hukum yang kredibel juga penting untuk memastikan aturan dan regulasi diikuti dengan baik, termasuk penanganan tindakan ilegal seperti penggunaan lahan secara tidak sah. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mendidik dan memberikan informasi yang akurat, sementara pemberdayaan masyarakat lokal dan pemahaman terhadap kepentingan bersama dapat menciptakan kerjasama yang lebih baik antara PT Geodipa dan masyarakat.